KOMISI IV
Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat

VOL. XVIII NO. 2/II/PUSAKA/JANUARI/2026

OPTIMALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN PESISIR BERKELANJUTAN

Rahmat Sawalman*

Abstrak

Besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan nelayan akibat berbagai kendala struktural. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong transformasi pembangunan pesisir secara terpadu melalui penguatan infrastruktur, kelembagaan, dan ekosistem ekonomi nelayan. Kajian ini bertujuan menelaah implementasi KNMP serta merumuskan strategi penguatan agar program mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Implementasi KNMP masih menghadapi tantangan berupa kesiapan lahan yang belum clean and clear, keterbatasan akses bahan bakar minyak bersubsidi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan pendampingan di sejumlah lokasi. Strategi menghadapi tantangan dapat dilakukan melalui penguatan peran nelayan sebagai subjek pembangunan, memperkuat koperasi sebagai entitas ekonomi kolektif, mendorong perencanaan berbasis data wilayah, serta memperbaiki tata kelola distribusi input produksi. Komisi IV DPR RI perlu memastikan pemerintah menjalankan program KNMP sesuai kebijakan yang ada, memastikan ketersediaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar nelayan, serta melakukan pengawasan implementasi program yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar karena luas perairannya dan letaknya di kawasan *Coral Triangle*, yaitu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Potensi lestari sumber daya ikan diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun (Yusuf et al., 2024). Dari sisi produksi, total perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2025 diperkirakan melampaui 23 juta ton, sementara nilai ekspor produk perikanan pada periode 2024–2025 berada di kisaran US$5 miliar. Namun, besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam lima tahun terakhir berkisar 2,29-2,83 persen (KKP, 2026), mengindikasikan rendahnya nilai tambah dan lemahnya posisi tawar nelayan. Nelayan masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan infrastruktur dasar serta akses permodalan dan pasar (Adriliansyah & Riofita, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *Email: rahmat.sawalman@dpr.go.id*

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir sebagai program strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir. Keberhasilan KNMP sangat bergantung pada kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program (Itjen KKP, 2025). Tantangan tersebut semakin mengemuka seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan memperluas cakupan KNMP hingga 1.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Kajian ini disusun untuk menelaah implementasi dan merumuskan strategi optimalisasi KNMP agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

Implementasi Program KNMP Beserta Tantangannya

Mengacu pada Asta Cita 2025–2029, pemerintah menegaskan komitmen pembangunan dari desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan program prioritas KNMP oleh KKP. Program ini mengusung pendekatan pembangunan berbasis kawasan (*area-based development*) yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat nelayan (Itjen KKP, 2025).

Hingga awal tahun 2026, implementasi program KNMP menunjukkan capaian awal yang signifikan melalui pembangunan di 65 lokasi pesisir dengan penyerapan sekitar 17.550 tenaga kerja, tidak hanya di sektor konstruksi tetapi juga nelayan dan layanan pendukung hulu hingga hilir. Capaian ini menegaskan peran KNMP sebagai penggerak ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja, yang selanjutnya akan diperluas melalui pembangunan tahap kedua di 35 lokasi dan rencana jangka panjang hingga 1.000 lokasi (Rizky, 2026).

Implementasi program KNMP di sejumlah daerah menunjukkan indikasi awal keberhasilan dalam mendorong transformasi pembangunan pesisir. Di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, penguatan infrastruktur dan aktivitas produksi perikanan meningkatkan peran kampung nelayan sebagai pemasok utama ikan bagi pasar lokal (Ayudiana, 2025). Sementara itu, keberhasilan KNMP Bentenge di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menembus pasar ekspor melalui pengiriman perdana ikan segar ke Arab Saudi didukung oleh kesiapan rantai dingin (*cold chain*) yang menjaga mutu ikan. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui koperasi serta dukungan logistik dan fasilitas produksi dari KKP memungkinkan nelayan memenuhi standar kualitas dan volume yang dipersyaratkan pasar ekspor (Ayudiana, 2026).

Meski demikian, implementasi KNMP masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kesiapan lahan yang belum sepenuhnya berstatus *clean and clear* (status lahan jelas dan bebas sengketa) di berbagai lokasi mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan dan tata kelola wilayah (Ayuningrum, 2025). Di sisi lain, keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik akibat kuota, jarak distribusi, maupun kendala administratif, meningkatkan

biaya operasional dan menekan aktivitas penangkapan ikan nelayan (Lukita G., 2025). Hasil survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang dilakukan di 19 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa tata kelola masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan tanpa diiringi penguatan kapasitas manajerial. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan usaha dan keuangan, serta distribusi pendamping yang belum merata, turut membatasi efektivitas implementasi KNMP (DFW Indonesia, 2026). Berbagai tantangan struktural dan operasional tersebut perlu segera ditangani secara sistematis dan lintas sektor agar program ini mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

Strategi Penguatan dan Optimalisasi Implementasi Program KNMP

Untuk memastikan KNMP berfungsi sebagai instrumen transformasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan yang terukur. *Pertama*, menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan yaitu melalui pelibatan aktif sejak tahap perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi program, sehingga KNMP benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi nelayan lokal, sekaligus mendorong rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program ini (Poerwanto, 2025). *Kedua*, penguatan komunikasi publik dan keterlibatan generasi muda. Inisiatif KKP melalui pemanfaatan media kreatif seperti *web series* "Samudranaya" menunjukkan pendekatan inovatif dalam mensosialisasikan KNMP kepada generasi muda dan masyarakat luas (KKP, 2025). *Ketiga*, penguatan kelembagaan ekonomi, khususnya koperasi nelayan, tidak hanya sebagai pengelola aset fisik, tetapi sebagai entitas bisnis kolektif yang mampu mengelola produksi, mengakses permodalan, serta membangun kemitraan pasar yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah penting untuk meningkatkan posisi tawar dan kemandirian ekonomi nelayan, yaitu dalam bentuk pendampingan manajerial, literasi keuangan, serta integrasi koperasi dengan rantai pasok dan ekosistem usaha perikanan nasional (DFW Indonesia, 2026).

Keempat, penguatan dan perluasan jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan KNMP, penyederhanaan mekanisme administrasi akses BBM subsidi berbasis data nelayan yang terverifikasi, serta pengelolaan distribusi BBM secara kolektif melalui koperasi nelayan. (Ayudiana, 2025). *Kelima*, perencanaan berbasis data yang kuat dan kontekstual. Pemetaan potensi sumber daya perikanan, kondisi sosial ekonomi, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik wilayah pesisir perlu dijadikan dasar dalam menentukan model pengembangan dan prioritas intervensi. (DFW Indonesia, 2026). *Keenam*, strategi afirmatif bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, akses energi, dan kapasitas kelembagaan harus dirancang agar program ini tidak memperlebar kesenjangan antarwilayah. Untuk menjawab tantangan kesiapan lahan yang belum sepenuhnya *clean and clear* di sejumlah lokasi, diperlukan penguatan perencanaan tata kelola wilayah sejak tahap awal, termasuk sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, kejelasan status lahan, serta integrasi dengan rencana tata ruang pesisir (Ayuningrum, 2025). Dengan strategi penguatan yang terencana, partisipatif, dan lintas sektor, KNMP diharapkan berkembang menjadi model pembangunan pesisir yang tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekologis masyarakat nelayan.

Penutup

Program KNMP memiliki peran strategis sebagai instrumen percepatan pengembangan kawasan pesisir yang lebih terarah dan berkelanjutan. Namun, tantangan implementasi yang mencakup lemahnya tata kelola, ketidakpastian status lahan, keterbatasan akses input produksi seperti BBM, serta kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang belum merata menegaskan bahwa keberhasilan KNMP hanya dapat dicapai melalui penguatan koordinasi lintas sektor, perencanaan berbasis data dan wilayah, serta pendampingan berkelanjutan yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan.

DPR RI memiliki peran penting untuk memastikan pemerintah melaksanakan program prioritas KNMP secara terukur sebagaimana Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Dalam fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu memastikan bahwa alokasi pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar produksi nelayan. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, implementasi KNMP perlu dipastikan berjalan secara partisipatif, berkeadilan antarwilayah, serta konsisten dengan tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Referensi

- Adriliansyah, N., & Riofita, H. (2025). Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional di Indonesia: pendekatan out approach. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(2), 17757–17762.
- Ayudiana, S. (2025, September 28). Memberdayakan pesisir lewat Kampung Nelayan Merah Putih. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/5139145/memberdayakan-pesisir-lewat-kampung-nelayan-merah-putih
- Ayudiana, S. (2026, January 10). Kampung nelayan di Sulsel ekspor perdana ikan segar ke Arab Saudi. *Antara News*. https://www.antaranews.com/ berita/5343753/kampung-nelayan-di-sulsel-ekspor-perdana-ikan-segar-ke-arab-saudi
- Ayuningrum, R. (2025, June 16). KKP ungkap tantangan bangun Kampung Nelayan Merah Putih. *Detik.com* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7966555/kkp-ungkap-tantangan-bangun-kampung-nelayan-merah-putih
- DFW Indonesia. (2026). *Hasil survei DFW: tata kelola koperasi desa merah-putih*. https://dfw.or.id/survei-dfw-implementasi-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-masih-didominasi-kepatuhan-administratif/
- Itjen KKP. (2025, November 28). *KKP dorong transparansi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dorong-transparansi-pembangunan-kampung-nelayan-merah-putih-knmp-Lv6v.html
- KKP. (2026). *Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. https://portaldata.kkp.go.id/portals/ data-statistik
- KKP. (2025, December 24). *Samudranaya, Jembatan KKP untuk dekatkan KNMP ke gen z*. Kampung Nelayan Merah Putih KKP. https://kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id/berita/1766566852/samudranaya-jembatan-kkp-untuk-dekatkan-knmp-ke-gen-z
- Lukita G., B. M. (2025, September 24). Program Kampung Nelayan Merah Putih dan tantangan penyerapan BBM subsidi. *Kompas.id* https://www.kompas.id/artikel/kampung-nelayan-dan-tantangan-bbm-subsidi
- Poerwanto, W. (2025). Reorientasi kebijakan permberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 15*(2), 167–186. https://doi.org/10.15578/jksekp.v15i2.19105
- Rizky, M. (2026, January 8). Mantap! 65 Kampung Nelayan Merah Putih serap 17.550 tenaga kerja. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/ news/20260108150222-4-700738/mantap-65-kampung-nelayan-merah-putih-serap-17550-tenaga-kerja
- Yusuf, M., Huda, M., Kurniawan, Muh. F. A. K., & Suharyanto. (2024). *Bijak mengelola laut untuk ekonomi biru*. In F. Octaviani & L. Nuriadi (Eds.), Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru | Oktober. Kementerian Kelautan dan Perikanan. https://kkp.go.id/storage/Materi/bijak-mengelola-laut-untuk-ekonomi-biru67a1d1fb9efb3/materi-67a1d1fba2841.pdf

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.